

Pengaruh Pajak Daerah dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh Tahun 2008 - 2018

Mirza Sayuti^{1*}, Rizki Maulana², Kayyis Rifqan³, Abrar⁴

^{1*,2,3,4} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

* Correspondence: mirzasayuti1@gmail.com

Received: 8 October 2023

Revised: 10 November 2023

Accepted: 25 November 2023

Published: 30 December 2023.



Citation: Sayuti, M., Maulana, R., Rifqan, K., & Abrar. (2023). Pengaruh Pajak Daerah dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh Tahun 2008 - 2018. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sekretari*, 8(3), 114–124. <https://doi.org/10.35870/jemensri.v8i3.3043>.



Copyright: © 2021 by the authors. Licensee Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sekretari, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research was conducted in Aceh province for the 2008-2018 period. The aim of this research is to determine the influence of regional taxes and government spending on economic growth in Aceh province in 2008-2018. This research uses secondary data for the 2008-2018 period sourced from the Central Statistics Agency and the Aceh Financial Management Agency. In this study, time series linear regression analysis was used using the eviews 9 analysis tool. The data used was 11 year time series data. Based on the results of tests carried out with probability on variables, it can be concluded that regional taxes and government spending have a positive and significant influence on economic growth in the narrow sense in Indonesia. From the results of the data regression carried out, the R² (Coefficient of Determination) value is 0.689762, this means that 68.97% of GRDP at constant prices in Aceh province can be explained by regional tax and government spending variables, while the remainder is 31.03% influenced by other variables.

Keywords: Local Tax; Government Expenditure; Economic Growth.

Abstrak: Penelitian ini dilakukan di provinsi Aceh periode 2008-2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh tahun 2008-2018. Penelitian ini menggunakan data sekunder periode 2008-2018 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Badan Pengelola Keuangan Aceh. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier time series menggunakan alat analisis eviews 9. Data yang digunakan adalah data time series 11 tahun. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan probabilitas pada variabel dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dan belanja pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam arti sempit di Indonesia. Dari hasil regresi data yang dilakukan, nilai R² (Koefisien Determinasi) sebesar 0.689762, hal ini berarti sebesar 68,97% PDRB atas dasar harga konstan di provinsi Aceh dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah dan belanja pemerintah, Sedangkan sisanya yaitu sebesar 31,03% dipengaruhi oleh variabel lain.

Kata Kunci: Pajak Daerah; Belanja Pemerintah; Pertumbuhan Ekonomi.

1. Pendahuluan

Indonesia salah satu negara yang memiliki luas negara dan penduduk terbesar di dunia. Untuk mengatur negara yang luas dan penduduk yang banyak, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan, dimana pusat pemerintahan berada di Jakarta dan setiap daerah dipilihkan pemimpin (dipilih oleh rakyat, dengan cara demokrasi) untuk membantu mengatur daerah dan masyarakat yang ada di kawasan kepemimpinannya. Salah satu tujuan yang ingin dicapai Indonesia adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bisa berdampak negatif dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan bahkan bisa tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu variabel yang difokuskan pemerintah untuk menumbuhkan ekonomi adalah pajak daerah dan belanja pemerintah. Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang sudah ditetapkan, dimana dana yang terkumpul dari pemungutan pajak ini akan dialokasikan untuk pembangunan ekonomi guna mencapai pertumbuhan ekonomi, contoh dari alokasi seperti pembangunan infrastruktur daerah. Pajak daerah ini sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Pungutan pajak ini dikenakan kepada semua objek pajak seperti orang atau badan dan benda bergerak atau tidak bergerak. Berikut tabel Pajak Daerah Provinsi Aceh:

Tabel 1. Pajak Daerah Provinsi Aceh Tahun 2015-2018

Tahun	Pajak Daerah (Milyar Rupiah)
2015	1.173
2016	1.253
2017	1.300
2018	1.372

Sumber: BPKA dan BPS Aceh, 2019

Berdasarkan tabel diatas, pajak daerah Aceh mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti pada 2017 mengalami peningkatan sebesar 47 Milyar Rupiah dibanding tahun sebelumnya (2016), begitu juga dengan tahun yang lainnya. Uang yang didapatkan dari pajak akan disalurkan lagi oleh pemerintah kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, belanja pegawai, mensubsidi produk kebutuhan masyarakat, dan lain sebagainya. Setiap tahunnya pemerintah pasti mengeluarkan anggaran untuk membantu pembangunan ekonomi di Indonesia, kegiatan ini dikenal dengan istilah belanja pemerintah. Belanja pemerintah kian tahun kian meningkat, seperti yang ditunjukkan tabel berikut ini:

Tabel 2. Belanja dari APBA Provinsi Aceh Tahun 2015-2018

Tahun	Belanja dari APBA Aceh (Milyar Rupiah)
2015	12.749
2016	12.874
2017	14.733
2018	15.084

Sumber: BPKA, di akses 2019

Berdasarkan tabel di atas kita bisa melihat bahwa belanja pemerintah mengalami peningkatan belanja pemerintah dari tahun ke tahun seperti pada tahun 2016 mengalami peningkatan 125 Triliun Rupiah dibanding tahun sebelumnya (2015). Stoilova dan Patanov (2012) dalam penelitian di Uni Eropa menyebutkan bahwa struktur pajak berdasarkan pajak langsung lebih efisien dalam hal mendukung pertumbuhan ekonomi di negara-negara Uni Eropa. Myles (2015) dalam penelitiannya di Inggris mengatakan bahwa Perpajakan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan bahwa efek-efek ini mungkin sangat besar. Poulson dan Kaplan (2008) dalam penelitiannya di Rust Belt (Amerika Serikat) ini mengungkapkan adanya dampak negatif yang signifikan dari tarif pajak marginal yang lebih tinggi pada pertumbuhan ekonomi. Abdullah dan Rusdarti (2017) dalam penelitiannya di Indonesia, Malaysia dan Singapura menunjukkan bahwa ada dampak pengeluaran pemerintah terhadap PDB di Indonesia, Malaysia dan Singapura. Babatunde (2018) dalam penelitiannya di Nigeria menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk transportasi dan komunikasi, pendidikan dan infrastruktur kesehatan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; pengeluaran untuk pertanian dan infrastruktur sumber daya alam mencatat efek terbalik yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria.

Fasoranti (2012) dalam penelitiannya di Nigeria menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk layanan kesehatan, transportasi dan komunikasi memberikan pertumbuhan negatif sementara pengeluaran untuk pertanian dan keamanan tidak signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Muhammad dan Karim (2012) dalam penelitiannya di Pakistan menyatakan bahwa dari hasil kointegrasi tidak ada hubungan antara pengeluaran dan pendapatan nasional dalam jangka panjang. Penelitian ini termotivasi oleh dari beberapa penelitian sebelumnya. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel, penulis hanya menggunakan 2 variabel independen, yaitu Pajak Daerah dan Belanja Pemerintah, dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel dependen dan penelitian ini dilakukan di Provinsi Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul "Pengaruh Pajak Daerah dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh tahun" Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1) Berapa besar pengaruh Pajak Daerah dan Belanja Pemerintah secara Simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2008 – 2018?
- 2) Berapa besar pengaruh Pajak Daerah dan Belanja Pemerintah secara Parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2008 – 2018?
- 3) Bagaimana hubungan kausalitas antara Pajak Daerah, Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2008 – 2018?

1.1 Tujuan Penelitian

- 1) Mengenalisis pengaruh Pajak Daerah dan Belanja Pemerintah secara Simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2008 – 2018.
- 2) Menganalisis pengaruh Pajak Daerah dan Belanja Pemerintah secara Parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2008 – 2018.
- 3) Menganalisis hubungan kausalitas antara Pajak Daerah, Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2008 – 2018.

2. Literatur Review

2.1 Pajak Daerah

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 10 adalah: "Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dasar Hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tercantum secara detail dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a) Pajak kendaraan bermotor;
 - b) Bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d) Pajak air permukaan; dan
 - e) Pajak rokok.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - a) Pajak hotel;
 - b) Pajak restoran;
 - c) Pajak hiburan;
 - d) Pajak reklame;
 - e) Pajak penerangan jalan;
 - f) Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g) Pajak parkir;
 - h) Pajak air tanah;
 - i) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - j) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak daerah yang diterima oleh Provinsi Aceh sejak tahun 2008 hingga 2018 mengalami peningkatan penerimaan pajak daerah setiap tahunnya di Provinsi Aceh, hal itu dibuktikan dengan data yang dikemukakan oleh BPS dan BPKA. Berikut perincian dari perkembangan pertumbuhan pajak daerah di Provinsi Aceh tahun 2008-2018:

Tabel 3. Perkembangan Pertumbuhan Pajak Daerah Provinsi Aceh
Tahun 2008-2018

Tahun	Pajak Daerah (Milyar Rupiah)	%
2008	476	-
2009	477	0,21
2010	522	8,62
2011	586	10,92
2012	687	14,70
2013	753	8,77
2014	1.031	26,96
2015	1.173	12,11
2016	1.253	6,39
2017	1.300	3,62
2018	1.372	5,25

Dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa pertumbuhan pajak di Provinsi Aceh pada periode 2008-2018 selalu mengalami peningkatan dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan pertumbuhan sebesar 26,96%, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009 dengan pertumbuhan sebesar 0,21%.

2.2 Belanja Pemerintah

Menurut Susanti, dkk (2017) belanja pemerintah merupakan seluruh pembelian atau pembayaran barang dan jasa untuk kepentingan nasional, seperti pembelian persenjataan dan alat-alat kantor pemerintah, pembangunan jalan dan bendungan, gaji pegawai negeri, angkatan bersenjata, dan lainnya. Disamping itu, pengeluaran pemerintah dapat menjadi penentu pokok jumlah pengeluaran agregat, dan juga penentu pertumbuhan GNP riil jangka pendek. Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintah dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesejahteraan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan adalah beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara. Pengeluaran belanja pemerintah yang dikeluarkan oleh Provinsi Aceh sejak tahun 2008 hingga 2018 masih belum stabil pada tahun tertentu, hal itu dibuktikan dengan data yang dikemukakan oleh BPS. Berikut perincian dari perkembangan pertumbuhan belanja pemerintah di Provinsi Aceh tahun 2008-2018:

Tabel 4. Perkembangan Pertumbuhan Belanja Pemerintah provinsi Aceh Tahun 2008-2018

Tahun	Belanja dari APBA Aceh (Milyar Rupiah)	%
2008	8.518	-
2009	9.791	13,00
2010	6.548	-49,53
2011	7.974	17,88
2012	9.711	17,89
2013	11.779	17,56
2014	13.368	11,89
2015	12.749	-4,86

2016	12.874	0,97
2017	14.733	12,62
2018	15.084	2,33

Dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa pertumbuhan belanja di Provinsi Aceh pada periode 2008-2018 masih belum stabil, dimana pada tahun 2010 dan 2015 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -49,53% dan -4,86%. Selain itu kita juga bisa melihat, tahun 2012 di Aceh terjadi pertumbuhan belanja pemerintah yang tinggi, yaitu 17,89%. Sedangkan pada tahun 2010 di Aceh terjadi pertumbuhan belanja pemerintah yang paling rendah, yaitu -49,53%.

2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) secara sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu, misalkan satu tahun. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika balas jasa riil terhadap penggunaan faktor - faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun - tahun sebelumnya. Menurut Sukirno (2006), pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Kemampuan suatu negara atau daerah untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat dari satu periode ke periode lainnya. Ada beberapa faktor yang dipandang oleh para ahli ekonomi sebagai sumber yang dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi, diantaranya:

- 1) Tanah dan Kekayaan Alam Lainnya
- 2) Jumlah dan Mutu dari Penduduk dan Tenaga Kerja
- 3) Barang-Barang Modal dan Tingkat Teknologi
- 4) Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi adalah proses terjadinya peningkatan pada produksi barang dan jasa dalam kegiatan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia ditunjukkan dengan adanya perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya perubahan tersebut diukur dengan data Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total nilai pasar dari barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu perekonomian di negara tersebut dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu satu tahun. Salah satu indikator makro ekonomi yang paling penting adalah Produk Domestik Regional Bruto atau dikenal dengan PDRB, PDRB digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada kurun waktu tertentu. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam kurun waktu tertentu, atau merupakan jumlah nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Perhitungan PDRB menggunakan 2 macam harga yaitu atas harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun bersangkutan. Sedangkan PDRB atas harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar dan saat ini menggunakan tahun 2010. PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah baik agregat maupun sektoral. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Aceh sejak tahun 2008 hingga 2018 masih belum stabil sepenuhnya karena masih mengalami naik dan turun, hal itu dibuktikan dengan data yang dikemukakan oleh BPKA. Berikut perincian dari perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2008-2018:

Tabel 5. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh Tahun 2008-2018

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Aceh (Milyar Rupiah)	%
2008	98.540	-
2009	98.661	0,12
2010	101.545	2,84
2011	104.874	3,17
2012	108.915	3,71
2013	111.756	2,54
2014	113.490	1,53
2015	112.666	-0,73

2016	116.384	3,20
2017	121.263	4,02
2018	151.542	19,98

Dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh pada periode 2008-2018 masih belum stabil, dimana pada tahun 2015 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -0,73%. Selain itu kita juga bisa melihat, tahun 2018 di Aceh terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yaitu 19,98%. Sedangkan pada tahun 2015 di Aceh terjadi pertumbuhan belanja pemerintah yang paling rendah, yaitu -0,73%.

2.4 Keterkaitan Pajak dengan Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa ada hubungan signifikan dan mempengaruhi antara pajak dengan pertumbuhan ekonomi, seperti penelitian yang dilakukan Abata (2014) di Nigeria yang menunjukkan bahwa pendapatan pajak berdampak signifikan pada implementasi Anggaran Pemerintah Federal di Nigeria, sistem administrasi perpajakan secara signifikan mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan di Nigeria, penghindaran pajak secara signifikan mempengaruhi pendapatan pemerintah di Nigeria, dan Kurangnya pelatihan pada bagian petugas pajak secara signifikan mempengaruhi generasi pendapatan pemerintah di Nigeria. Akhor (2016) dalam penelitiannya di Nigeria juga menunjukkan bahwa pajak pertambahan nilai dan bea cukai memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Macek (2015) dalam penelitiannya di negara-negara OECD menemukan bahwa perpajakan perusahaan diikuti oleh pajak penghasilan pribadi dan kontribusi jaminan sosial paling berbahaya (berpengaruh besar) bagi pertumbuhan ekonomi.

Beberapa penelitian terdahulu lainnya menyatakan bahwa ada hubungan positif antara pajak dengan pertumbuhan ekonomi, seperti penelitian yang dilakukan Egbunike, dkk (2012) di Nigeria dan Ghana ditemukan bahwa ada dampak positif dari pendapatan pajak pada produk domestik bruto Nigeria dan Ghana. Akoya dan Afintinni (2016) dalam penelitiannya di Nigeria menemukan bahwa perpajakan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Veronika dan Lenka (2012) dalam penelitian di European Union menunjukkan bahwa pajak perusahaan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu ada penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa ada hubungan negatif antara pajak dengan pertumbuhan ekonomi, seperti penelitian yang dilakukan Yi dan Suyono (2014) di China yang menunjukkan hasil bahwa adanya dampak negatif dari peningkatan penerimaan pajak pada pertumbuhan ekonomi mungkin tidak seserius yang dipikirkan orang dan pemotongan pajak akan menciptakan efek yang lebih positif di Provinsi Hebei. Selain itu, efek negatifnya semakin lambat dan semakin jelas.

2.5 Keterkaitan Belanja Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan dan hubungan antara belanja pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi, seperti penelitian yang dilakukan oleh Babatunde (2018) di Nigeria menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk transportasi dan komunikasi, pendidikan dan infrastruktur kesehatan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; pengeluaran untuk pertanian dan infrastruktur sumber daya alam mencatat efek terbalik yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Lahirushan dan Gunasekara (2015) dalam penelitiannya di negara Asia ditemukan bahwa ada kausalitas searah dari pertumbuhan ekonomi ke pengeluaran pemerintah dan pengeluaran pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia. Abdieva, dkk (2017) dalam penelitiannya di Kyrgyzstan dan Tajikistan ditemukan bahwa kausalitas tidak langsung dari pengeluaran pemerintah ke pertumbuhan ekonomi di Kyrgyzstan. Tetapi uji kausalitas Granger terhadap ekonomi Tajikistan tidak memberikan hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel ini. Selain itu ada penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara belanja pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi, seperti penelitian yang dilakukan Ladan (2017) di Nigeria yang menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan jangka panjang antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Nigeria dan bahwa pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi keduanya independen, menyiratkan bahwa kausalitas tidak berjalan dari pengeluaran pemerintah ke pertumbuhan ekonomi atau sebaliknya.

Beberapa penelitian terdahulu lainnya menyatakan bahwa ada hubungan positif antara belanja pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi, seperti penelitian yang dilakukan Danda (2011) di Jordan yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah pada tingkat agregat memiliki dampak positif pada pertumbuhan PDB yang kompatibel dengan teori Keynesian.

Jelilov dan Musa (2016) dalam penelitiannya di Nigeria ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Selain itu ada penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa ada hubungan negatif antara belanja pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi, seperti penelitian yang dilakukan Nworji, dkk (2012) di Nigeria yang menunjukkan bahwa belanja modal dan berulang pada PT jasa ekonomi memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi selama periode penelitian. Juga, pengeluaran modal untuk transfer tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan. Tetapi

pengeluaran modal dan berulang untuk layanan sosial dan masyarakat dan pengeluaran berulang untuk transfer memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ho1 : Pajak daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

Ha1 : Pajak daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi

Ho2 : Belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

Ha2 : Belanja pemerintah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi

3. Metode

Dilihat dari segi jenisnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka, dimana data dalam penelitian ini berbentuk time series. Data ini merupakan realisasi dari pajak daerah, belanja daerah dan produk domestik regional bruto (PDRB) di Provinsi Aceh periode 2008-2018. Menurut sumber perolehannya maka data dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data tersebut diperoleh secara tidak langsung dari sumber utamanya melainkan diperoleh dari pihak ketiga yang berkaitan dengan penelitian ini dalam bentuk laporan. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari realisasi dari pajak daerah, belanja daerah dan produk domestik regional bruto (PDRB) di Provinsi Aceh periode 2008-2018 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA).

3.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yakni peneliti mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA).

1) Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah PDRB di Provinsi Aceh pada periode 2008-2018. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu periode tertentu, atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah sama dengan pertumbuhan PDRB di wilayah tersebut.

2) Variabel Independen (X)

Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah pajak daerah dan belanja pemerintah di Provinsi Aceh pada periode 2008-2018.

3) Pajak Daerah (X_1)

Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4) Belanja Pemerintah (X_2)

Belanja pemerintah merupakan seluruh pembelian atau pembayaran barang dan jasa untuk kepentingan nasional, seperti pembelian persenjataan dan alat-alat kantor pemerintah, pembangunan jalan dan bendungan, gaji pegawai negeri, angkatan bersenjata, dan lainnya.

3.2 Metode Analisis

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan model analisis regresi data time series. Regresi data time series adalah sekumpulan observasi dalam rentang waktu tertentu yang dikumpulkan dalam interval waktu secara kontinu. Dalam penelitian ini, time series data selama periode tahun 2008-2018. Secara ekonometrika, hubungan antara pajak daerah, belanja pemerintah terhadap PDRB di Provinsi Aceh dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + bX_1 + bX_2$$

Dimana:

Y = Pertumbuhan ekonomi (PDRB)

X_1 = Pajak daerah

X_2 = Belanja Pemerintah

Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji t. Uji F digunakan untuk menguji pengaruh pajak daerah dan belanja pemerintah secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Apabila nilai F hitung > F table atau nilai p-value < 0,05 dapat diartikan secara simultan pajak daerah dan belanja pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga hipotesis diterima.
- 2) Apabila nilai F hitung < F table atau nilai p-value > 0,05 dapat diartikan secara simultan pajak daerah dan belanja pemerintah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga hipotesis ditolak.

Statistik uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen (pajak daerah dan belanja pemerintah) secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan ketentuan apabila nilai t hitung suatu variabel lebih besar bila dibandingkan dengan nilai t table (p-value > 0,05) berarti variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya apabila nilai t hitung suatu variabel lebih kecil bila dibandingkan dengan nilai t table (p-value < 0,05) berarti variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk menguji tingkat keeratan atau keterkaitan antar variabel dependen dan variabel independen bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (*adjusted R-square*). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan kaitannya dengan variabel dependen sangat terbatas, sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variansi variabel dependen.

4. Hasil dan Pembahasan

Untuk melihat seberapa besar pajak daerah dan belanja pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh, maka harus dilakukan pengujian regresi linear time series pada data-data yang telah dikumpulkan. Berikut tabel estimasi hubungan antar variabel:

Tabel 6. Output Regresi Linier Time Series

Dependent Variable: LPE				
Method: Least Squares				
Date: 06/22/19 Time: 09:24				
Sample: 2008Q1 2018Q4				
Included observations: 44				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.739127	0.491312	19.82269	0.0000
LPD	0.207122	0.054608	3.792924	0.0005
LBP	0.053751	0.084708	0.634539	0.5293
R-squared	0.689762	Mean dependent var		11.62541
Adjusted R-squared	0.674628	S.D. dependent var		0.116778
S.E. of regression	0.066612	Akaike info criterion		-2.514129
Sum squared resid	0.181921	Schwarz criterion		-2.392480
Log likelihood	58.31084	Hannan-Quinn criter.		-2.469016
F-statistic	45.57827	Durbin-Watson stat		0.278130
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan hasil regresi linier time series yang diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$LPE = 9.739127 + 0.207122 LPD + 0.053751 LBP$$

Koefisien regresi variabel pajak daerah sebesar 0.207122 menunjukkan adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi (PDRB). Hal ini berarti setiap kenaikan pajak daerah di provinsi Aceh sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 21% poin dengan asumsi variabel lainnya konstan. Koefisien regresi variabel belanja pemerintah sebesar 0.053751 menunjukkan adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi (PDRB). Hal ini berarti setiap kenaikan belanja pemerintah di provinsi Aceh sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 5,4% poin dengan asumsi variabel lainnya konstan. Koefisien determinasi (R²) bernilai 0.689762, hal ini berarti sebesar 68,97% PDRB atas dasar harga konstan di provinsi Aceh dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah dan belanja pemerintah. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 31,03% dipengaruhi oleh variabel lain.

4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F dimaksudkan untuk melihat ada tidaknya pengaruh bersama-sama yaitu pajak daerah (PD) dan belanja pemerintah (BP) terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). Berdasarkan hasil regresi dari pengaruh pajak daerah dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh tahun 2008-2018 yang ditunjukkan pada hasil regresi linier time series diperoleh nilai F hitung sebesar 45.57827 dengan probabilitas sebesar

0.000000 > alpha 5% (0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen pajak daerah dan belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh tahun 2008-2018.

4.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t bertujuan untuk melihat berapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Diketahui bahwa t hitung untuk variabel pajak daerah (PD) sebesar 3.792924 dengan probabilitas 0.0005 lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap variabel terikat PDRB pada alpha 5% atau dengan kata lain pajak daerah berpengaruh signifikan pada taraf keyakinan 95% terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh tahun 2008-2018. Variabel belanja pemerintah (BP) memiliki nilai t hitung sebesar 0.634539 dengan probabilitas 0.5293 lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa belanja pemerintah tidak berpengaruh positif terhadap variabel terikat PDRB pada alpha 5% atau dengan kata lain belanja pemerintah tidak berpengaruh signifikan pada taraf keyakinan 95% terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh tahun 2008-2018.

5. Kesimpulan dan Saran

Dari hasil uji signifikansi simultan menunjukkan bahwa variabel independen pajak daerah dan belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh tahun 2008-2018. Hal itu didapatkan dari hasil regresi linier time series diperoleh nilai F hitung sebesar 45.57827 dengan probabilitas sebesar 0.000000 > alpha 5% (0,05). Dari hasil uji signifikansi parsial menunjukkan bahwa t hitung untuk variabel pajak daerah (PD) sebesar 3.792924 dengan probabilitas 0.0005 lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap variabel terikat PDRB pada alpha 5% atau dengan kata lain pajak daerah berpengaruh signifikan pada taraf keyakinan 95% terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh tahun 2008-2018. Variabel belanja pemerintah (BP) memiliki nilai t hitung sebesar 0.634539 dengan probabilitas 0.5293 lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa belanja pemerintah tidak berpengaruh positif terhadap variabel terikat PDRB pada alpha 5% atau dengan kata lain belanja pemerintah tidak berpengaruh signifikan pada taraf keyakinan 95% terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh tahun 2008-2018.

Berdasarkan kesimpulan di atas dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan baik bagi pihak pemerintah atau pun penelitian lanjutan, yaitu:

- 1) Bagi pemerintah provinsi Aceh untuk tetap menjaga dan mengoptimalkan pajak daerah sebaik mungkin agar bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh
- 2) Pemerintah daerah dinilai perlu untuk mengevaluasi kembali ketepatan sasaran dari belanja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga bisa membantu pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh.
- 3) Bagi peneliti mendatang sebaiknya menambah variabel yang diteliti, yaitu tidak hanya pajak daerah dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.

6. Referensi

- Abata, M. A. (2014). The impact of tax revenue on Nigerian economy: Case of Federal Board of Inland Revenue. *Journal of Policy and Development studies*, 289(1849), 1-13.
- Abdieva, R., Baigonushova, D., & Ganiev, J. (2017). Relationship between government expenditure and economic growth in transition Countries: Case of Kyrgyzstan and Tajikistan. *Bilig*, (83), 241-258.
- Abdullah, M. A., & Rusdarti, R. (2017). The Impact of Government Expenditure on Economic Growth in Indonesia, Malaysia and Singapore. *Journal of Economic Education*, 6(1), 11-18.
- Akhor, S. O., & Ekundayo, O. U. (2016). The impact of indirect tax revenue on economic growth: The Nigeria experience. *Igbinedion University Journal of Accounting*, 2(08), 62-87.
- Amri, K., Masbar, R., & Aimon, H. (2019). Is there a causality relationship between local tax revenue and regional economic growth? A panel data evidence from indonesia. *Regional Science Inquiry*, 11(1), 73-84.
- Babatunde, S. A. (2018). Government spending on infrastructure and economic growth in Nigeria. *Economic research-Ekonomska istraživanja*, 31(1), 997-1014.

- Çakerri, L., Petanaj, M., & Muharremi, O. (2014). The effect of government expenditures on economic growth. The case of Albania. *European Journal of Social Sciences Education and Research*, 1(2), 242-254.
- Chude, N. P., & Chude, D. I. (2013). Impact of government expenditure on economic growth in Nigeria. *International journal of business and management review*, 1(4), 64-71.
- Dandan, M. M. (2011, February). Government expenditures and economic growth in Jordan. In *International Conference on Economics and Finance Research, Singapore* (Vol. 4, pp. 467-471).
- Dewi, J. K., & Budhi, M. K. S. (2018). Analisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah terhadap tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(6), 1695-1722.
- Dolenc, P., & Laporšek, S. (2012). Labour taxation and its impact on employment growth. *Managing Global Transitions*, 10(3), 301-318.
- Ebong, F., Ogwumike, F., Udongwo, U., & Ayodele, O. (2016). Impact of government expenditure on economic growth in Nigeria: A disaggregated analysis. *Asian journal of economics and empirical research*, 3(1), 113-121.
- Egbunike, F. C., Emudainohwo, O. B., & Gunardi, A. (2018). Tax revenue and economic growth: A study of Nigeria and Ghana. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 7(2), 213-220.
- Fasoranti, M. M. (2012). The effect of government expenditure on infrastructure on the growth of the Nigerian economy, 1977-2009. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 2(4), 513-518.
- Gangal, V. L., & Gupta, H. (2013). Public expenditure and economic growth: A case study of India. *Global Journal of Management and Business Studies*, 3(2), 191-196.
- Jelilov, G., & Musa, M. (2016). The impact of government expenditure on economic growth in Nigeria. *Sacha Journal of Policy and Strategic Studies*, 5(1), 15-23.
- Ladan, H. (2017). Public expenditure and economic growth in nigeria: an application of co-integration and error correction modeling. *Journal of Economics and Business Research*, 23(1), 185-208.
- Lahirushan, K. P. K. S., & Gunasekara, W. G. V. (2015). The impact of government expenditure on economic growth: A study of Asian countries. *International Journal of Humanities and Social Sciences*, 9(9), 3152-3160.
- Leasiwal, T. C. (2016). Pengaruh Investasi Pemerintah, Konsumsi Pemerintah, Pajak dan Retribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku. *Jurnal Ekonomi*, X (1), 69-81.
- Loizides, J., & Vamvoukas, G. (2005). Government expenditure and economic growth: Evidence from trivariate causality testing. *Journal of Applied Economics*, 8(1), 125-152. DOI: <https://doi.org/10.1080/15140326.2005.12040621>.
- Macek, R. (2014). The impact of taxation on economic growth: Case study of OECD countries. *Review of economic perspectives*, 14(4), 309-328.
- Maingi, J. N. (2017). The impact of government expenditure on economic growth in Kenya: 1963-2008. *Advances in Economics and Business*, 5(12), 635-662.
- Muhammad, F., Xu, T., & Karim, R. (2015). Impact of expenditure on economic growth in Pakistan. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 5(2), 231-236.
- Myles, G. D. (2000). Taxation and economic growth. *Fiscal studies*, 21(1), 141-168. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1475-5890.2000.tb00583.x>.
- Nworji, I. D., Okwu, A. T., Obiwuru, T. C., & Nworji, L. O. (2012). Effects of public expenditure on economic growth in Nigeria: A disaggregated time series analysis. *International journal of management sciences and business research*, 1(7), 1-15.
- Onakoya, A. B., & Afintinni, O. I. (2016). Taxation and economic growth in Nigeria. *Asian Journal of Economic Modelling*, 4(4), 199-210.
- Poulson, B. W., & Kaplan, J. G. (2008). State income taxes and economic growth. *Cato J.*, 28, 53.

- Stoilova, D., & Patonov, N. (2013). An empirical evidence for the impact of taxation on economy growth in the European Union. *Tourism & Management Studies*, (3), 1031-1039.
- Sukirno, S. (2004). Makroekonomi teori pengantar.
- Veronika, B., & Lenka, J. (2012). Taxation of corporations and their impact on economic growth: The case of EU countries. *Journal of competitiveness*, 4(4), 96-108.
- Yi, F., & Suyono, E. (2014). The relationship between tax revenue and economic growth of Hebei province based on the tax multiplier effect. *Global Economy and Finance Journal*, 7(2), 1-18.